



## Jokowi Pertanyakan Tudingan Anggaran Bocor



HAFIDZ MUBARAK A/ANTARA FOTO

**PIDATO** - Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo menyampaikan pidato saat menghadiri deklarasi dukungan dari alumni SMA se-Jakarta di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (10/2).

**JAKARTA, SP** - Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi), menanggapi soal tudingan APBN yang disebut bocor. Dia pun mempertanyakan kembali tudingan itu.

Sebelumnya, capres Prabowo Subianto menaksir anggaran bocor 25 persen. Nilai itu setara sekitar Rp500 triliun.

“Saya sampaikan, anggaran kita di 2018 itu Rp2.000 lebih triliun. Kalau 25 persen bocor itu kan artinya Rp500 triliun. Itu duit Rp500 triliun ada di mana? Saya bertanya, hitungannya dari mana?” kata Jokowi di acara deklarasi Alumni Jakarta BerSATU di Istora, Senayan, Jakarta, Minggu (10/2).

• Baca Halaman 7

### Hal 1 ■ jokowi pertanyakan

Jokowi menilai tudingan seperti itu bisa membuat masyarakat menjadi resah. Padahal, setiap tahunnya APBN itu selalu disahkan oleh persetujuan semua fraksi yang ada di DPR.

“Jangan membuat pernyataan yang membuat masyarakat menjadi resah. Iya, ndak? Yang namanya anggaran itu, setiap tahun digedok, disetujui oleh semua fraksi yang ada di DPR, semua fraksi sudah tanda tangan. Artinya, su-

dah menyetujui, sudah setuju semua,” katanya.

Realisasi anggaran tersebut juga dipertanggungjawabkan dan disetujui oleh semua fraksi di DPR.

“Itu mekanisme politik. Jangan sampai semua sudah tanda tangan, kemudian baru ngomong Rp500 triliun bocor, bocor, bocor, dari mana?” kata Jokowi, yang disambut teriakan dan tepuk tangan.

Setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga se-

lalu mengaudit penggunaan anggaran oleh pemerintah. Hasil audit BPK terhadap kementerian dan lembaga, sekitar 80 persen mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Kalau tidak ada yang benar, pasti juga sudah ditangkap yang namanya KPK,” jelas Jokowi.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto kembali menuding pemerintahan Presiden Jokowi mengalami kebocoran

anggaran sebesar 25 persen atau setara dengan Rp500 triliun. Kebocoran yang dimaksud adalah penggembungan anggaran atau *mark up*. Contohnya proyek yang seharusnya hanya bernilai Rp100 diakui Rp150.

“Proyek yang harganya 100 dibilang 150. Itu namanya apa, penggembungan, namanya *mark up*. Dan ini terjadi terus-menerus. Kita harus objektif masalah ini sudah jalan lama. Ini harus kita hentikan dan kurangi,” jelasnya. (det/bls)